

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA**

Jln Mayor Sugianyar Kompleks Civic Centre Tlp (0365) 41067 Fax (0365) 42026
NEGARA- BALI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Jember tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Jember tahun 2025 ini merupakan kewajiban sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dan sekaligus sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jember, serta Rencana Strategis Bappeda.

Dengan tersusunnya Rencana Kerjanya, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target Tahun 2025, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan Rencana Kerja Tahun ini.

Negara, 6 Januari 2025
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Jember,

I Wayan Sudiarta, S.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700604 200003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Struktur Organisasi, TugasPokok dan Fungsi	6
D. Kewenangan	10
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA TAHUN 2025....	11
A. RencanaStrategis.....	11
B. RencanaKerjaTahun 2025	20
BAB III PENUTUP	30
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
LAMPIRAN 1 : MATRIK USULAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	
 BAPPEDA TAHUN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamintercapainyapelaksanaantugasdankegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jembrana, sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Jembrana 2025, maka disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisikan tentang tingkat target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuannya dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatannya.

Sebagai bagian dari perangkat Daerah, setiap pengelola pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana terutama Kepala Unit Kerja Mandiri dan Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) untuk masa lima tahun yang dijabarkan ke dalam rencana kinerja tahunan (RKT) setiap tahun.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 2025 disamping sebagai wujud implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja Instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi dan tujuan Kabupaten Jembrana, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 bagi Kepala Bappeda Kab. Jembrana kepada Bupati.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Bappeda Kabupaten Jembrana telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya untuk menyempurnakan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kini telah terbit Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Bappeda Kabupaten Jembrana juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LKjIP, mulai dari staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan strategis Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Jembrana.

Penyusunan	Rencana	Kinerja	Tahunan	(RKT)
Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 2025 untuk menetapkan rencana kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis dalam pencapaian sasaran dan dapat digunakan sebagai panduan pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala sehingga sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk menentukan target keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.				program

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang – undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden no. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015 – 2019.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 3, Provinsi Bali : 3, 40 /2021)

32. Peraturan Daerah KabupatenJembranaNomor 10 Tahun 2016 tentangPembentukan dan SusunanPerangkatDaearah (LembaranDaerahKabupatenJembranaTahun 2016Nomor64, TambahanLembarandaerahKabupatenJembrana No. 51)
33. Peraturan Daerah KabupatenJembranaNomor10Tahun 2024tentangAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah KabupatenJembranaTahunAnggaran 2024 (Lembaran Daerah Kab.JembranaTahun 2024Nomor10);
34. PeraturanBupatiJembranaNomor38 Tahun 2024tetangPenjabaranAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah KabupatenJembranaTahunAnggaran 2025 (Berita Daerah Kab.JembranaTahun 2024Nomor39);
35. PeraturanBupatiJembranaNomor 40 Tahun 2021 tentangPerubahanatasperaturanBupatiNomor 32 Tahun 2020 TentangRencanaKerjaPemerintah Daerah SemestaBerencanaTahun 2021;
36. PeraturanBupatiJembranaNomor 27 Tahun 2021 tentangRencanaKerjaPemerintah Daerah SemestaBerencanaTahun 2022;
37. PeraturanBupatiJembrana No.33 tahun 2019tentangKedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah KabupatenJembranaTahun 2019 Nomor 35)

C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bappeda Kabupaten Jembrana merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance) maka penyusunan rencana kinerja setiap awal tahun merupakan suatu keharusan. Rencana Kinerja Tahun 2025 didasarkan pada struktur organisasi daerah, dimana Bappeda Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berfungsi dalam Pengelolaan Perencanaan Umum Pemerintah, Pengendalian Hasil Pembangunan dan Pengendalian Tata Ruang wajib melaporkan hasil kerjanya guna mewujudkan Good Governance.

adapun Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah". Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

- (a) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- (b) pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

ungsinya.

Gambaran layanan Bappeda sebagaimana Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016 adalah :

Pertama : melakukan layanan kepada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Jembrana berupa koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kedua : Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 806/ Bappeda.PM / 2010 Bappeda Litbang berfungsi sebagai sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2016 tentang "Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah" dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 55 Tahun 2016, tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah", dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dengan fungsi :

- perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya;
- pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkungannya;
- Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungannya;
- Pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkungannya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidangnya.

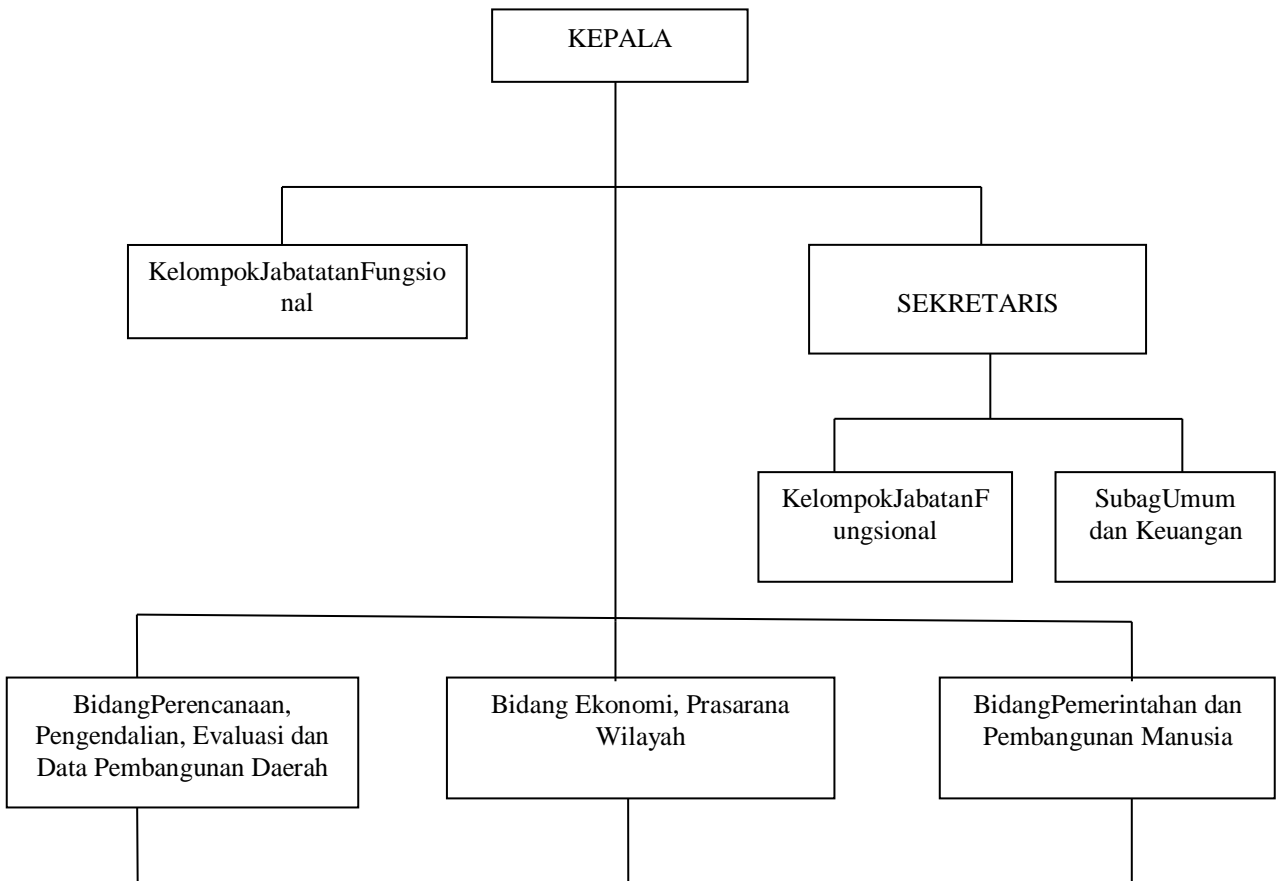
Sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember adalah :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang;
- c. Sub Bagian;
- d. Sub Bidang;
- e. Jabatan Fungsional;

Sedangkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut;

LAMPIRAN 2.1

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Jembrana**



Kelompok Jabatan Fungsional
1

Kelompok Jabatan Fungsional
1

Kelompok Jabatan Fungsional
1

D. KEWENANGAN

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka disusunlah kewenangan pemerintah daerah.

Untuk kewenangan pemerintah daerah dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam melaksanakan kewenangan daerah Bappeda Kabupaten Jember melaksanakan urusan penunjang yang meliputi urusan perencanaan pembangunan.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategi pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda Kabupaten Jember akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat tergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur perencananya.

Terorganisasinya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program kedepan, sehingga Bappeda Kabupaten Jembrana dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda Kabupaten Jembrana akan terus melakukan upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategi pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dan publik.

B A B II

RENCANA KERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

A. RENCANA STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya sistem dokumentasi perencanaan pembangunan daerah
2. Proses perencanaan masih belum optimal didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasis satu data
3. Rendahnya sistem pengendalian kinerja
4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
5. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2025. Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2025 disusun berdasarkan

tugas pokok dan fungsi Bappeda. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan lebih lanjut melalui program Bagian Sekretariat, Bidang dan Fungsional. Jabaran tugas pokok dan fungsi Bappeda didasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun rencana kerjanya tahun Bappeda juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Sehingga Rencana Kerja Tahunan mencakup visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jember

Mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jember tahun 2021 - 2026 dengan motto: "Masyarakat Jember Bahagia", maka ditetapkan visi Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah: **"Mewujudkan Masyarakat Jember Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana"**.

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Jember yang ditetapkan adalah **"Sad Kerthi Loka Jember"** yang terdiri dari :

1. Membangun Ketakwaan Kepada Tuhan (Atma Kethi), Dengan Tujuan yaitu : Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya dengan **Indikator**: Indeks kerukunan Umat Beragama (KUB)

Sasaran :

- a. Meningkatkan Toleransi hidup beragama dengan Indikator :
 - Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama
- b. Meningkatkan aksistensi adat dan budaya dengan indikator:
 - Persentase kee / kelompok kesenian yang aktif
 - Cakupan budaya tak benda lestari
 - Cakupan budaya benda lestari

2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdayasaing (Jana Kerthi), Dengan Tujuan; Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdayasaing dengan **Indikator**: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan Indikator :
 - Angka harapan lama sekolah
 - Angka rata – rata lama sekolah
 - Indeks pembangunan literasi masyarakat
 - b. Meningkatkan kualitas kesehatan dengan Indikator :
 - Angka harapan hidup
 - c. Meningkatkan daya saing SDM dengan Indikator :
 - Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)
3. Menjaga kelestarian hutan pegunungan, hutan bakau dan buyuk sebagai satu kesatuan ekosistem dalam konsep segar gunung (Wana Kerthi), Dengan **Tujuan** Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dengan **Indikator** : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Sasaran :**
- a. Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan dengan Indikator :
 - Indeks kualitas air
 - Indeks kualitas udara
4. Pelestarian dan pemanfaatan sumber – sumber air untuk kehidupan (Danu Kerthi), Dengan **Tujuan** Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan sumber - sumber air dengan **Indikator** Persentase pelestarian dan pemanfaatan sumber sumber air.
- Sasaran :**
- a. Meningkatkan kualitas air bersih dan sehat dengan indikator :
 - Persentase penduduk berakses air minum
 - b. Meningkatkan diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal dengan Indikator :
 - Pencapaian skor polapanan harapan (PPH)
 - c. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dengan Indikator :
 - Nilai Tambah produk pertanian
5. Memelihara dan memanfaatkan potensi laut untuk kehidupan (segara Kerthi), Dengan **Tujuan** Terwujudnya ragam komoditas perikanan yang berorientasi lokal dan kebutuhan pasar dengan **Indikator** : Tingkat kesejahteraan nelayan
- Sasaran :**
- a. Meningkatkan ekonomi sektor perikanan dengan Indikator :

- Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

6. Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi), Dengan **Tujuan Ke-1** Terwujudnya ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum dengan **Indikator** : Indeks Demokrasi Daerah,

Sasaran 1 :

- a. Meningkatkan ketentraman, kenyamanan, ketertiban umum dan stabilitas politik dengan Indikator :
 - Prosentase penegakan perda
- b. Meningkatkan kapasitas dalam penanganan bencana dengan Indikator :
 - Indeks risiko bencana

Tujuan Ke-2 Terwujudnya masyarakat Jembrana Bahagia dengan

Indikator : Indeks Kebahagiaan Masyarakat.

Sasaran 2:

- a. Meningkatkan kemandirian masyarakat dengan Indikator :
 - Cakupan PMKS Mandiri
 - Indeks desa membangun (IDM)
- b. Meningkatnya Kesetaraan Gender dengan Indikator :
 - Indeks pembangunan gender
- c. Terpenuhinya hak – hak anak dengan Indikator :
 - Capaian kabupaten layakanak

Tujuan ke-3 : Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

Indikator : Laju pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Sasaran 1 :

- a. Meningkatkan investasi daerah dengan Indikator :
 - Jumlah nilai investasi berskala nasional dan asing (PMDN/PMA)
- b. Meningkatkan peran usaha ekonomi rakyat dengan Indikator :
 - Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB
 - Kontribusi industri rumah tangga terhadap sektor PDRB sektor industri
 - Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di sector pariwisata dengan Indikator :
 - Kontribusi pariwisata terhadap PAD
- d. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar

- Presentase irigasi berkondisi baik
- Persentase zona rawan banjir dan genangan
- Persentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik
- Rasio rumah layak huni
- Persentase sarana dan prasarana transportasi berkondisi baik

Tujuan ke- 4 :Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju kota cerdas (Smart City)

Indikator :Indek Reformasi Birokrasi

Sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah dengan indikator :
 - Tingkat kepuasan Pelayanan
- b. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan indikator :
 - Nilai Sakip

Berdasarkan visi dan misi Bupati Jembrana terpilih untuk periode 2021 - 2026 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi maka Bappeda Kabupaten Jembrana melaksanakan semua misi Bupati Jembrana, Adapun keterkaitan antara misi tujuannya sasaran dan urusannya dalam RPJMD Kabupaten Jembrana 2021 – 2026 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jembrana adalah Misi Ke- 6 :

- **Penataan alam untuk sumber kehidupan dan kebahagiaan (Jagat Kerthi)**

Dengan tujuan, sasaran, Indikator dan Urusan sebagai berikut :

- a. Tujuan misi ke-6 Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju Kota Cerdas (Smart City) dengan indikator tujuan Indek Reformasi Birokrasi dengan indikator Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Kabupaten Jembrana dengan Provinsi Bali dan Nasional didukung oleh ketersediaan data dan kapasitas lembaga perencana dengan target : 100 % (Urusan: Perencanaan)

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jembrana terdapat kendala / faktor – faktor penghambat dalam melaksanakan urusan sehingga visi dan misi Bupati dan wakil Bupati serta tujuan, sasaran.

Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Jembrana, Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2016 tentang "Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah" dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2023, tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah”, dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dengan fungsi :

- perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Jemberana, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Jemberana Tahun 2021 - 2026, maka ditetapkan Tujuan.

Berikut diuraikan keterkaitan antara Misi dengan Tujuan Prioritas sebagai berikut :

Tabel 4.1

Keterkaitan Misi dan Tujuan Prioritas Bappeda Kabupaten Jemberana

Misi	Tujuan Prioritas	Indikator Tujuan	Target
1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju Kota Cerdas (Smart City) dengan Indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi dengan Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Kabupaten Jemberana dengan Provinsi Bali dan Nasional didukung oleh ketersediaan data dan kapasitas lembaga perencanaan dengan target	1. Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	1. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA.	100 %
		2. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD di dalam RKPD	100 %
		3. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %
		4. Kesesuaian rencana Pembangunan dengan RTRW	100 %
			100

			%
--	--	--	---

4. Strategi Bappeda Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2021 - 2026. Strategi dan Kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan kebijakandalam Renstra OPD selanjutnyamenjadidasarperumusankegiatanBappeda bagisetiap program prioritas RPJMD yang menjaditugas dan fungsiBappeda.

Strategi dan arahkebijakanmerupakanrumusanperencanaankomperhensiftentangbagaimanaBappeda mencapaitujuan dan sasarandenganefektif dan efisien. Denganpendekatan yang komprehensif, strategi jugadapatdigunakan sebagaisaranauntukmelakukantransformasi, reformasi, dan perbaikankinerjabirokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti tabel berikut :

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Jembrana

VISI : Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana			
MISI I : Penataanalamuntuksumberkehidupan dan kebahagiaan (Jagat kerthi)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah	Menyediakan data dan informasi yang valid untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
			Meningkatkan koordinasi dalam perumusan program dan target kinerja dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
			Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi program - program pembangunan daerah

Secara garis besar keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu tahun 2021 - 2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.4

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dan Program
Bappeda Kabupaten Jembrana**

Tujuan			Sasaran			Strategi
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA	100%	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dok	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%		Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	1 dok	
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2 dok	
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	Mendorong sinergitas terlaksananya program pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2025

1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis:

Renja Bappeda Kabupaten Jembrana Tahun 2025 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Jembrana.

Untuk mengakselerasi pencapaian target, Indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu landaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Jembrana tahun 2024 dengan memperhatikan capaian tahun 2024, Renjaini juga perlu memperhatikan dokumen RKPD Kabupaten Jembrana serta kebijakan daerah kibatadanya Kebijakan Nasional yang harus dilaksanakan di daerah.

Renja Bappeda Kabupaten Jembrana mengacu pada Kepmendagri 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, dengan 4 (Empat) Program dan 15 (Lima belas) Kegiatan dan 61 (Enampuluh satu) Sub. Kegiatan.

Tabel 2.1. Target dan Indikator Kinerja

PROGRAM/Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator	Target		Anggaran (Rp)
PERENCANAAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.53	Nilai	Rp. 5.030.023.161
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	18	Dokumen	Rp. 10.922.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun	9	Dokumen	Rp. 7.395.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	1	Dokumen	Rp. 276.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA - SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	1	Dokumen	Rp. 276.000
Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	1	Dokumen	Rp. 1.200.000

Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	1	Dokumen	Rp. 925.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	Dokumen	Rp. 480.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	1	Dokumen	Rp. 370.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Bappeda	8	Dokumen	Rp. 4.254.537.961
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21	Orang	Rp. 4.252.847.961
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Laporan	Rp. 296.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	Rp. 222.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD setiap bulan	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12	Dokumen	Rp. 222.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	Laporan	Rp. 500.000
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan dan semesteran SKPD	24	Laporan	Rp. 450.000
Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4	Laporan	Rp. 250.000
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2	Laporan	Rp. 125.000
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2	Laporan	Rp. 125.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Presentase Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100	%	Rp. 20.972.000
Pengadaan Pakaian Dinas besertakelengkapannya (Pakaian Olah Raga)	Tersedianya pakaian olah raga untuk ASN dan tenaga kontrak	Jumlah pakaian olah raga	30	Paket	Rp. 10.500.000
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	tersedianya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	Dokumen	Rp. 222.000

Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1	Dokumen	Rp. 150.000
Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Tersedianya jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1	Dokumen	Rp. 100.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kompetensi pegawai dalam melaksanakan tupoksi.	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	orang	Rp. 10.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan pegawai terhadap peraturan perundangan.	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	100	orang	Rp. 0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kompetensi pegawai dalam hal mengimplementasikan peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	50	orang	Rp. 0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Bappeda	100	%	Rp. 225.249.700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen / instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	Rp. 935.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	Rp. 63.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	paket	Rp. 41.447.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	paket	Rp. 8.000.000
Fasilitas kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1	Laporan	Rp. 7.055.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang diadakan	1	Laporan	Rp. 104.812.000
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang diadakan	Jumlah barang milik daerah penunjang pemerintah daerah yang diadakan	100	%	Rp. 279.800.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	3	Unit	Rp. 279.800.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah.	Persentase cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	Rp. 40.400.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat.	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Laporan	Rp. 1.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum/dministrasi kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	Rp. 39.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya fungsi barang milik daerah.	Persentase sarana dan prasarana aparat yang layak fungsi	100	%	Rp. 197.891.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianyajasapemeliharaan dan pajakkendaraanperorangandinasataukendaraan dinasjabatan	Jumlahkendaraanperorangandinasataukendaraan dinasjabatan yang dipelihara dan dibayarkanpajaknya	1	Unit	Rp. 36.487.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianyajasapemeliharaan dan pajakkendaraan dinas Operasionalataulapangan	Jumlahkendaraan dinas operasi onalataulapangan yang dipelihara dan dibayarkanpajak dan perizinannya	17	Unit	Rp. 108.778.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Optimalnyafungsiperalatan dan mesin	jumlahperalatan dan mesinlainnya yang dipelihara	14	Unit	Rp. 8.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Berfungsinyagedungkantor dan bangunansecara optimal.	Jumlahgedungkantor dan bangunanlainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1	Unit	Rp. 42.125.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Berfungsinyasarana gedung / kantorataubangunanlainnyasecara optimal.	Jumlahsarana dan prasaranapedukungkantorataubangunanlainnya yang dipelihara / direhabilitasi	49	Unit	Rp. 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Berfungsinyasarana pendukunggedung / kantorataubangunanlainnyasecara optimal.	Jumlahsarana dan prasaranapendukunggedungkantorataubangunanlainnya yang dipelihara / direhabilitasi	21	Unit	Rp. 2.500.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNANDAERAH	Tingkat kesesuaian RKPD,RPJMD, RPJPD dengan RPJPD dan RPJMD provinsidengan RPJMN	Persentasekesesuaian program tahunandengan program RPJMD	100	%	Rp. 563.158.000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnyadokumenperencanaanpembangunandaerah	Jumlahdokumenperencanaanpembangunandaerah	3	Dokumen	Rp. 464.965.000
PelaksanaanKonsultasi Publik	Penyelenggaraan Konsultasi Publik	Jumlahlaporanpenyelenggaraankonsultasi publik	2	Berita acara (RKPD, RPJMD)	Rp. 6.080.000
Analisis kondisis daerah permasalahan dan isustrategispembangunandaerah	Tersedianyadokumenrancanganawal RPJMD/RKPD	Jumlahdokumenrancanganawal RPJMD/RKPD (sesuaikebutuhanjika RPJMD makarancanganteknokratik)	1	Dokumen (ranwal RKPD)	Rp. 4.624.000
Koordinasipenelaahdokumen perencanaanpembangunandaerahdengandokumenkebijakanlainnya	Tersedianyatelaahdokumen perencanaanpembangunandaerah	Jumlahtelaahdokumenperencanaanpembangunandaerah	2	Dokumen (RKPD,IRPJMMD)	Rp. 1.390.000
KoordinasiPelaksanaan ForumPerangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Forum SKPD / lintas SKPD	JumlahBerita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	31	Berita acara	Rp. 3.340.000
PelaksanaanMusrenbangKabupaten / Kota	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	JumlahBerita Acara MusrenbangKabupaten/Kota	2	Berita acara	Rp. 30.150.000
Penyiapanbahankoordinasimusrenbangkecamatan	Pedoman musrenbang kecamatan / kewilayahan	Jumlahusulan yang terverifikasi oleh kecamatan	5	Usulan (setiapkecamatan)	Rp. 2.870.000
KoordinasiPenyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota	- Dokumen RPJMD - Dokumen RKPD - Dokumen Perubahan RKPD	Jumlahdokumenperencanaanpembangunandaerahkabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen (RKPD, PRKPD,RPJMD)	Rp. 416.511.000
Analisis Data dan Informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan dalam Aplikasi SIPD yang tersusun	Terisinya elemen Data SIPD pada Aplikasi	1	Dokumen	Rp. 10.072.000
Analisis Data Informasi perencanaan pembangunan daerah	Presentaseterpenuhnyaellemen data pada aplikasi SIPD	Jumlah dokumen data pada sistem informasi pembangunan daerah	1	Dokumen	Rp. 6.025.000
Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	31	Orang (setiap OPD)	Rp. 1.235.000

Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota	Tersedianya buku profil pembangunan daerah yang telah diterbitkan	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	1	Dokumen	Rp. 2.812.000
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya evaluasi Program/kegiatan Renja dan RKPD	Jumlah money pelaksanaan RKPD yang tersusun	2	Dokumen	Rp. 6.836.000
Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen data dan informasi hasil Evaluasi RKPD yang tersusun	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	2	Laporan	Rp. 3.312.000
Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten / kota	Tersedianya laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	1	Laporan	Rp. 3.524.000
Implementasi sistem informasi pemerintah daerah di bidang Pembangunan daerah	Terlaksananya implementasi sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah	Cakupan implementasi sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah; Jumlah dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah	3	Dokumen (RKPD, PRKPD, RPJMD)	Rp. 81.285.000
Pengelolaan data dalam sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah	Tersedianya data dalam sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola	Jumlah data dalam sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah yang dikelola	31	Data (setiap data OPD)	Rp. 31.035.000
Penerapan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah	Tersedianya dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil penerapan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah	3	Dok (RKPD, PRKPD, RPJMD)	Rp. 50.250.000
PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah	Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	100	%	Rp. 83.235.000
Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Tingkat kesesuaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Dokumen perencanaan Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, prosentase koordinasi sinergitas dan pencapaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	6	Dokumen	Rp. 43.375.000
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1	Dokumen	Rp. 4.425.000
Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Terlaksananya asistensi perencanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	1	Dokumen	Rp. 2.210.000
Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	1	Dokumen	Rp. 1.625.000
Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Tersedianya laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD / RPJMD pada bidang pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/renja dengan RKPD / RPJMD pada bidang pemerintahan	1	Dokumen	Rp. 3.450.000
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	Dokumen	Rp. 7.600.000

manusia(RPJPD,RPJMD dan RKPd)	usia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)				
AsistensiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananyaasistensipenyusunanandokumenperencanaanpembangunanbidangpembangunanmanusia	Jumlahlaporanhasilasistensipenyusunanandokumenperencanaanpembangunanperangkatdaerahbidangpembangunanmanusia	1	Dokumen	Rp. 1.850.000
Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	1	Dokumen	Rp. 1.415.000
Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi rencana / renja dengan RKPd / RPJMD pada bidang pembangunan manusia	1	Dokumen	Rp. 20.800.000
Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumberdayaalam)	Tingkat kesesuaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumberdayaalam)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA (Sumberdayaalam) persentase koordinasi sinergitas dan pencapaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumberdayaalam)	1	Dokumen	Rp. 11.350.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang di koordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	2	Laporan	Rp. 2.650.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan asistensi penyusunan dan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	2	Laporan	Rp. 1.500.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	2	Laporan	Rp. 1.400.000
Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Tersusun dokumen hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi rencana / renjadengan RKPd / RPJMD pada bidang perekonomian	2	Laporan	Rp. 1.250.000
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA yang di koordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	2	Laporan	Rp. 1.500.000
Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Tersusunnya dokumen perencanaan bidang SDA	Jumlah Laporan hasil asistensi penyusunan dan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	2	Laporan	Rp. 1.250.000
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA	Tersusunnya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang SDA	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	2	Laporan	Rp. 900.000
Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah dokumen perencanaan bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi rencana / renjadengan RKPd/RPJMD pada bidang SDA	1	Laporan	Rp. 900.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Tingkat kesesuaian perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah	Persentase koordinasi sinergitas dan pencapaian perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah; tersusunnya	1	Dokumen	Rp. 28.510.000

	erencanaan pembangunan perangkaat daerah bidang pembangunan manusia																		
	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia																		
	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumberdaya alam)																		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA																		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		

B A B III
P E N U T U P

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tahun 2025 ini merupakan komitmen Bappeda Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Bappeda Kabupaten Jember merupakan penjabar dan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerajeras oleh sumbu berdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah kabupaten Jember dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khusus yang dilindungi Bappeda. Dimana keberhasilan suatu OPD tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jember pada tahun 2025. Akhirnya meskipun Rencana Kinerja Tahunan ini disusun dengan melibatkan seluruh aparat yang ada di Bappeda, namun disadari masih terdapat kekurangan – kekurangan, untuk hal tersebut akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Negara, 6 Januari 2025

Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Jember,

I Wayan Sudiarta, S.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700604 200003 1 010

MATRIK RANCANGAN RENJA BAPPEDA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	RANCANGAN AKHIR		K
KODE	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	Rancangan Awal	GET
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			5,676,416,161	
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SakipPerangkat Daerah	83.53	5,030,023,161	
5.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JumlahdokumenPerencanaan, penganggaran dan Evaluasikinerjaperangkatdaerah yang tersusun	18 Dok	10,922,000	
5.01.01.2.01	PenyusunanDokumenPerencanaanPerangkat Daerah	JumlahdokumenperencanaanPerangkat Daerah	9 dok	7,395,000	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunanDokumen RKA-SKPD	JumlahDokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanDokumen RKA-SKPD	1 dok	3,580,000	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD	Jumlahdokumenperubahan RKA-SKPD dan LaporanhasilkoordinasipenyusunanDokumen RKA-SKPD	1 dok	276,000	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	JumlahDokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanDokumen DPA-SKPD	1 dok	1,200,000	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunanperubahan DPA-SKPD	JumlahDokumenPerubahan DPA-SKPD dan laporanhasilkoordinasipenyusunandokumenperubahan DPA-SKPD	1 dok	925,000	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Jumlahlaporancapaiankinerja dan ikhtisarrealisasikinerja SKPD dan laporanhasilkoordinasipenyusunanlaporancapaiankinerja dan ikhtisarrealisasikinerja SKPD	4 dok	480,000	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JumlahlaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	370,000	

5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun setiap bulan, triwulan dan semesteran	8 dok	4,254,537,961	
5.01.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 org	4,252,847,961	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 lap	269,000	
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12 dok	222,000	
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dok	222,000	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	500,000	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran SKPD	24 laporan	450,000	
5.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Lap	250,000	
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 lap	125,000	
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 lap	125,000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase cakupan disiplin aparatur	100%	20,972,000	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	30 paket	10,500,000	
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dok	222,000	
5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dok	150,000	
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dok	100,000	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Org	10,000,000	

5.01.01.2.05.0010	SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikutisosisialisaperaturanperundang - undangan	100 Org	-	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturanPerundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikutibimbinganteknisimplementasiaturanperundang - undangan	50 Org	-	
5.01.01.2.06	AdministrasiUmumPerangkat Daerah	Prosentasecakupanpelayananadministrasi perkantoran	100%	225,249,700	
5.01.01.2.06.0001	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlahkomponen / instalasilistrikdanpeneranganbangunankantor yang disediakan	1 paket	935,000	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaanperalatan dan perlengkapankantor	Jumlahpaketperalatan dan perlengkapankantor yang disediakan	1 paket	63,000,000	
5.01.01.2.06.0004	PenyediaanBahanLogistik Kantor	Jumlahpaketbahanlogistikkantor yang disediakan	3 paket	41,447,500	
5.01.01.2.06.0005	PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	Jumlahpaketbarangcetakan dan penggandaan	2 paket	8,000,000	
5.01.01.2.06.0008	FasilitaskunjunganTamu	Jumlahlaporanfasilitaskunjungantamu	1 lap	7,055,200	
5.01.01.2.06.0009	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlahlaporanpenyelenggaraanrapatkoordinasikoordinasi dan konsultasi SKPD	1 lap	104,812,000	
5.01.01.2.07.	PengadaanBarangmilikdaerahpenunjangurusanpemerintahdaerah	Prosentaseketersediaanbarangmilikdaerahpenunjangpemerintahdaerah	100%	279,800,000	
5.01.01.2.07	PengadaanKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraanperorangandinasataukendaraandinasjabatan yang Disediakan	3 unit	279,800,000	
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Persentasecakupanlayananjasa penunjangurusanpemerintahdaerah	100%	40,400,000	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlahlaporanpenyediaanjasasuratmenyurat	1 Lap	1,400,000	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	JumlahLaporanpenyediaanjaspelayananumumkantor yang disediakan	1 Lap	39,000,000	
5.01.01.2.09.	PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Prosentasecakupansarana dan prasarana yang di bangun	100%	197,891,000	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlahkendaraanperorangandinasataukendaraandinasjabatan yang dipelihara dan dibayarkanpajaknya	1 Unit	36,487,500	

5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 Unit	108,778,500	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	8,000,000	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	42,125,500	
5.01.01.2.09.00010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	49 unit	-	
5.01.1.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	21 unit	2,500,000	
5.01.2..	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase kesesuaian Program tahunan dengan program RPJMD	100%	563,158,000	
5.01.2.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	464,965,000	(R)
5.01.2.2.01.0001	Analisis kondisi daerah permasalahan dan isu strategi pembangunan daerah	Jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD makarancang teknokratik)	1 dokumen (Ranwal RKPD)	4,624,000	(R)
5.01.2.2.01.0002	Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen (RKPD, RPJMD)	1,390,000	(R)
5.01.2.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik	2 Berita Acara (RKPD, RPJMD)	6,080,000	2 (R)
5.01.2.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	31 Berita Acara	3,340,000	31 (R)
5.01.2.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara (RKPD, RPJMD)	30,150,000	2 (R)

5.01.2.2.01.0006	PenyiapanBahanKoordinasiMusrenbangKecamatan	Jumlahusulan yang terverifikasi oleh kecamatan	5 Usulan (setiapkecamatan)	2,870,000	(set
5.01.2.2.01.0007	KoordinasiPenyusunan dan PenetapanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlahdokumenperencanaanpembangunandaerahkabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen (RKPD, PRKPD, RPJMD)	416,511,000	(RI
5.01.2.2.02.	Analisis Data dan InformasiPemerintahan Daerah BidangPerencanaan Pembangunan Daerah	Jumlahdokumen data dan informasihasilvaluasi RKPD yang tersusun	1 dokumen	10,072,000	
5.01.2.2.02.0001	Analisis Data dan InformasiPerencanaan Pembangunan Daerah	Jumlahdokumenhasilanalisis data untukpenyusunankebijakanperencanaanpembangunandaerah	1 dokumen	6,025,000	
5.01.2.2.02	Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunanperangkatdaerah	Jumlah orang yang dibinadalam pemanfaatan data dan informasi	31 orang (setiap OPD)	1,235,000	31
5.01.2.2.02.0003	Penyusunanprofilpembangunandaerahkabupaten / kota	Jumlahbukuprofilpembangunandaerah yang diterbitkan	1 dokumen	2,812,000	
5.01.2.2.07.	Pengendalian, Evaluasi dan PelaporanBidangPerencanaan Pembangunan Daerah	Jumlahmonevpelaksanaan RKPD yang tersusun	2 dokumen	6,836,000	
5.01.2.2.07.0001	Koordinasipengendalianperencanaan dan pelaksanaanpembangunandaerahpembangunandaerah di kabupaten / kota	Jumlahlaporanhasilpengendalianperencanaan dan pelaksanaanpembangunan	1 laporan	3,524,000	
5.01.2.2.07.0003	Monitoring, Evaluasi dan PenyusunanLaporanBerkalaPelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlahlaporanhasilvaluasikinerjapembangunandaerah	2 laporan	3,312,000	
5.01.2.2.07.	Implementasisisteminformasipemerintahdaerah di bidangpembangunandaerah	Jumlahdokumenhasilpenerapsisteminformasipemerintahdaerah di bidangpembangunandaerah	3 dokumen (RKPD, PRKPD, RPJMD)	81,285,000	(RI
5.01.2.2.07.0001	Pengelolaan data dalam sisteminformasipemerintahdaerah di bidangpembangunandaerah	Jumlah data dalam sisteminformasipemerintahdaerah di bidangpembangunandaerah yang dikelola	31 data (setiap OPD)	31,035,000	3
5.01.2.2.07.0002	Penerapsisteminformasipemerintahdaerah di bidangpembangunandaerah	Jumlahdokumenhasilpenerapsisteminformasipemerintahdaerah di bidangpembangunandaerah	3 dokumen (RKPD, PRKPD, RPJMD)	50,250,000	(RI

5.01.3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase ketersediaan data dan informasi pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah	100%	83,235,000	
5.01.3.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen perencanaan Bidang pemerintahan	6 dok	43,375,000	
5.01.3.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang tersusun (dok)	1 dok	4,425,000	
5.01.3.2.01.0002	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah dokumen hasil asistensi perencanaan pembangunan yang tersusun	1 dok	2,210,000	
5.01.3.2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang tersusun (dok)	1 dok	1,625,000	
5.01.3.2.01.0004	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang tersusun	1 dok	3,450,000	
5.01.3.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen data hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan yang tersusun	1 dok	7,600,000	
5.01.3.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan sumberdaya manusia yang tersusun	1 dok	1,850,000	
5.01.3.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monev perencanaan bidang pembangunan sumberdaya manusia yang tersusun (dok)	1 dok	1,415,000	
5.01.3.2.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembangunan sumberdaya manusia yang tersusun (dok)	1 dok	20,800,000	
5.01.3.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumberdaya alam	1 dok	11,350,000	
5.01.3.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang tersusun	2 Lap	2,650,000	

5.01.3.2.02.0002	AsistensiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPerekonomian	JumlahLaporanasistensipenyusunanperencanaanpembangunandaerahbidangperekonomian yang tersusun	2 Lap	1,500,000	
5.01.3.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPerekonomian	JumlahLaporanmonevpenyusunandokumenperenca	2 Lap	1,400,000	
5.01.3.2.02.0004	Koordinasipelaksanaansinergitas dan harmonisasi perencanaanpembangunandaerahbidangperekonomian	JumlahLaporanperencanaanpembangunanbidangperekonomian yang tersusun	2 Lap	1,250,000	
5.01.3.2.02.0005	Koordinasipenyusunandokumenperencanaanpembangunandaerahbidangperekonomian dan SDA	JumlahLaporankoordinasiperencanaanpembangunandaerahbidangperekonomian yang tersusun	2 Lap	1,500,000	
5.01.3.2.02.0006	Asistensipenyusunandokumenperencanaanpembangunanperangkatdaerahbidang SDA	JumlahLaporanasistensiperencanaanpembangunandaerahbidang SDA yang tersusun	2 Lap	1,250,000	
5.01.3.2.02.0007	Pelaksanaan monitoring dan evaluasipenyusunandokumenperencanaanpembangunanbidangperekonomian dan SDA	Jumlahlaporanpelaksanaan monitoring dan evaluasiperencanaanpembangunanbidang SDA	2 Lap	900,000	
5.01.3.2.02.0008	Koordinasipelaksanaansinergitas dan harmonisasi perencanaanpembangunandaerahbidang SDA	Jumlahlaporanhasilinkronisasirenstra / renjadengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	1 lap	900,000	
5.01.3.2.03.	KoordinasiPerencanaanBidangInfrastruktur dan Kewilayahan		1 dok	28,510,000	
5.01.3.2.03.0001	KoordinasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah BidangInfrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	JumlahLaporanPerencanaan Pembangunan Daerah BidangInfrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun (Dokumen)	2 Lap	2,800,000	
5.01.3.2.03.0002	AsistensiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur	JumlahLaporanPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur yang tersusun (Dokumen)	2 Lap	400,000	
5.01.3	Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur	JumlahLaporanPelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangInfrastruktur	2 Lap	18,750,000	
5.01.3.2.03	KoordinasiPelaksanaanSinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan Daerah BidangInfrastruktur	JumlahLaporanPelaksanaanSinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan Daerah BidangInfrastruktur	2 Lap	2,650,000	
5.01.3.2.03.0005	KoordinasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah BidangKewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	JumlahLaporanPerencanaan Pembangunan Daerah BidangKewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang tersusun (Dokumen)	2 Lap	2,210,000	

5.01.3.2.03.0006	AsistensiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan	JumlahLaporanPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan yang tersusun (Dokumen)	2 Lap	900,000	
5.01.3.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan	JumlahLaporanPelaksanaan Monitoring dan EvaluasiPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangKewilayahan (Laporan)	2 Lap	400,000	
5.01.3.2.03.0008	KoordinasiPelaksanaanSinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan Daerah BidangKewilayahan	JumlahLaporanPelaksanaanSinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan Daerah BidangKewilayahan	2 Lap	400,000	

Negara, 6 Januari 2025
Plt. KepalaBappedaKabupatenJembrana,

I WayanSudiarta, S.P
PembinaUtama Muda (IV/c)
NIP. 19700604 200003 1 010